



Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah



Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

KPJM SEBAGAI SALAH SATU PENDEKATAN PENGANGGARAN

KB 1



Latar Belakang dan Manfaat KPJM



1. Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik (**allocative efficiency**)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (**to improve quality of planning**)
3. Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (**best policy option**)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (**fiscal discipline**)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (**fiscal sustainability**).



- Penganggaran yang lebih berorientasi pada hasil (output dan outcome) dengan menggunakan prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah dan money follows function.
- Pola penganggaran menjadi "**rolling budget**" dengan mengacu pada perhitungan baseline.

Tujuan dan Sasaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah



1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Agregate Fiscal Discipline (Disiplin Fiskal Secara Menyeluruh)
3. Efisiensi Alokasi (Allocative Efficiency)
4. Efisiensi Operasional (Operational efficiency)

PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH

KB 2



PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH



1. Perbedaan antara Penganggaran Tahunan dan MTEF
2. Prasyarat Penerapan KPJM
3. Kerangka Konseptual KPJM
4. Proses Penyusunan dan Prinsip Kerja KPJM
5. KPJM Level satuan Kerja

Perbedaan antara Penganggaran Tahunan dan MTEF



No	Kebijakan	Sistem Penganggaran Tradisional	MTEF
1.	Disiplin Fiskal	Fokus pada kondisi makro ekonomi jangka pendek	Menggunakan kerangka jangka menengah baik kondisi makro ekonomi jangka menengah maupun sisi kebutuhan dan pendanaan sektoral
2.	Keterkaitan antara Perencanaan dan penganggaran	Lemah, dikarenakan penyusunan kebijakan tidak terkait langsung dengan ketersediaan Anggaran dengan demikian kebijakan menjadi tidak berkesinambungan dan tidak menggambarkan	Penyusunan kebijakan sangat terikat dengan ketersediaan anggaran yang ada. Sehingga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran menjadi jelas. Disamping itu prioritas pembangunan dapat lebih baik

Perbedaan antara Penganggaran Tahunan dan MTEF



No	Kebijakan	Sistem Penganggaran Tradisional	MTEF
3	Kinerja Dan Pelayanan Masyarakat	Insentif untuk meningkatkan <i>output</i> maupun <i>outcome</i> rendah. Hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan adalah kontrol pada input	Menekankan pada pencapaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang telah disepakati sebelumnya. Insentif untuk meningkatkan kinerja menjadi terbangun mengingat adanya mekanisme pengukuran kinerja
4	Kewenangan Pengguna Anggaran	Secara umum lemah mengingat kontrol dilakukan secara mendetail	Tinggi, mengingat <i>hard budget constrain</i> yang ada disertai dengan mekanisme peningkatan akuntabilitas pengguna anggaran

Prasyarat Penerapan KPJM



1. Adanya prioritas yang dicirikan dengan:
2. Fokus pada hasil (Result) yang dicirikan dengan:
3. Koordinasi cross organizational;
4. Dukungan terhadap proses desentralisasi meliputi: reward dan punishment, kejelasan tugas dan tanggung jawab, kombinasi mekanisme pengawasan yang mencakup pengawasan oleh pemerintah daerah, media massa serta pilihan pengguna.
5. Membuat iklim perbandingan dan pembelajaran (ukuran kompetisi).

Proses Penyusunan dan Prinsip Kerja KPJM



1. Menyusun Kerangka Ekonomi Makro
2. Menyusun Pagu sektoral Atau Pagu Kementerian/Lembaga
3. Penyusunan Proposal Kegiatan
4. Pembahasan Proposal Usulan
5. Finalisasi Dan Penyampaian Ke Parlemen

KPJM Level Satuan Kerja



1. Memperkirakan pagu anggaran satuan kerja tersebut dengan memperhatikan trend alokasi anggaran dari tahun ke tahun;
2. Menyusun proposal kegiatan level satuan kerja dan perkiraan kebutuhan pendanaan disesuaikan dengan prioritas kementerian dan kinerja yang telah dicapai satuan kerja pada tahun anggaran sebelumnya, target kinerja tahun mendatang serta kebutuhan anggaran untuk mencapai kinerja tersebut;
3. Menyusun dan mempersiapkan proposal kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan untuk kegiatan yang baru (new inisiatif) namun tetap dalam koridor tusi satuan kerja dan arah kebijakan pemerintah pusat sehingga terlihat dengan jelas kemajuan atau progres yang akan dicapai dari tahun ke tahun apabila dibandingkan dengan sebelumnya.

ANGKA DASAR (BASELINE)

KB 3



Angka Dasar (Baseline)

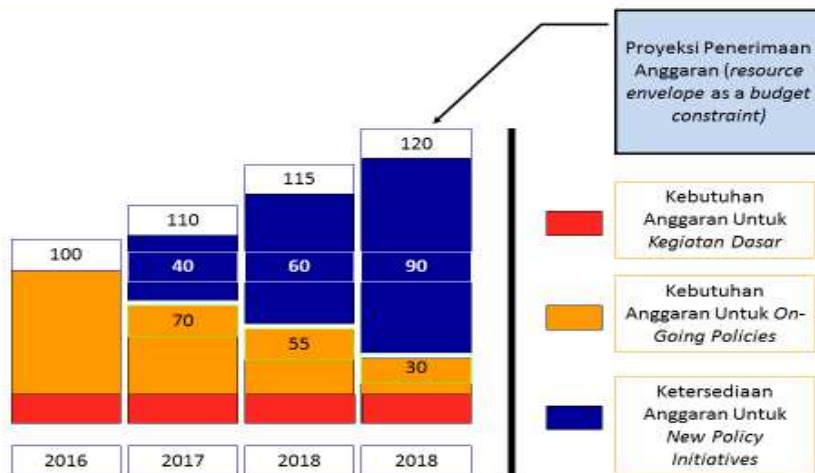


- Metode Penghitungan ANGKA DASAR (BASELINE);
- Menghitung Penyesuaian Angka Dasar

Metode Penghitungan ANGKA DASAR (BASE LINE)



ILUSTRASI - KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH



1. Kegiatan Teknis
2. Kegiatan Generik

Metode Penghitungan KPJM



Jenis Kegiatan		Metodologi Penghitungan		Penyesuaian		Baseline Baru
		Volume	Tipe Biaya	Parameter Ekonomi	Parameter Non ekonomi	
1. Kegiatan yang bersifat generik	Gaji dan Tunjangan	Data Base Pegawai	SBU		Kebijakan Baru di bidang Kepegawaian	Baseline Baru Gaji dan Tunjangan
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Aset	SBU	Inflasi		Baseline Baru
2. Kegiatan yang Bersifat Teknis	Layanan birokrasi/ publik	Output Layanan	SBK	Inflasi		Baseline Baru
		Output Kegiatan	SBU/ SBK	Inflasi	Parameter Spesifik Kegiatan	Baseline Baru kegiatan prioritas

Penyesuaian Baseline



- Adanya perubahan Parameter ekonomi, contohnya perubahan asumsi untuk Inflasi.
- Adanya perubahan Parameter non-ekonomi, biasanya dapat berupa:
- Penyusunan Prakiraan Maju untuk TA berikutnya.

INISIATIF BARU

KB 4



- Konsep dan Istilah Terkait Kebijakan New Inisiatif;
- Tujuan Penerapan Kebijakan Inisiatif Baru;
- Landasan Konseptual;
- Kategori dan Sumber Pendanaan Inisiatif Baru
- Syarat dan Tata Cara Pengusulan Inisiatif Baru
- Peran Masing-Masing Institusi dalam Penyusunan New Initiative
- Langkah Penyusunan Proposal



Konsep dan Istilah Baru



Tujuan Penerapan Inisiatif Baru



1. Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran
2. Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
4. Melakukan Efisiensi

Landasan Konseptual



1. Fleksibilitas dalam Perencanaan dengan Tetap Menjaga Akuntabilitas .
2. Perencanaan Berorientasi pada Arah Kebijakan
3. Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik (Transparansi dan Akuntabilitas)
4. Berorientasi pada Pencapaian Kinerja

Kategori dan Sumber Pendanaan



1. Program (Fokus Prioritas), *Outcome*, Kegiatan, dan Output Baru
2. Penambahan Volume Target
3. Percepatan Pencapaian Target

Syarat dan Pengusulan Inisiatif Baru



1. Munculnya arah kebijakan
Kementerian/Lembaga yang baru
2. Perubahan di kebijakan berjalan
Kementerian/Lembaga

PENERAPAN KPJM DI INDONESIA

KB 5





- Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional;
- Tata Cara Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju;

Penerapan KPJM



- Mekanisme review terhadap kegiatan prioritas dapat dijabarkan sebagai berikut:
- Apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan prioritas yang ditetapkan berlanjut atau berhenti oleh Pemerintah? Cek dokumen terkait, seperti RPJMN, RKP dan Renja KL;
- Jika berlanjut, periksa apakah output-output kegiatan prioritas tersebut masih berlanjut (ongoing output) atau berhenti (terminating output) sesuai dengan kebijakan pemerintah terbaru. Cek dokumen terkait, seperti RPJMN, RKP dan Renja KL;

Penerapan KPJM



- Jika berlanjut, apakah output-output kegiatan prioritas tersebut merupakan output dengan target tertentu dan bersifat terbatas (cap) atau output yang mengakomodasi setiap perubahan target (demand driven)? Cek dokumen terkait seperti RPJMN, RKP dan Renja KL;
- Periksa komponen input-komponen input, output sebagai berikut:
- Jika telah melakukan review sesuai dengan karakteristik output dan komponen input pada point 4 lakukan penyesuaian penghitungan terhadap alokasi baseline.

Tata Cara Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju



Tata cara menghitung prakiraan maju awal (*baseline*).

Output Prioritas = Komponen kebijakan + Komponen pendukung kebijakan
 Komponen kebijakan = harga x kuantitas x indeks kumulatif
 Komponen pendukung kebijakan = harga x kuantitas x indeks kumulatif

Tata Cara Memperbaharui Prakiraan Maju (Penyesuaian Baseline)



- Penyesuaian penghitungan alokasi kegiatan prioritas nasional karena perubahan kebijakan
- Penyesuaian penghitungan alokasi kegiatan prioritas nasional karena perubahan kebijakan dan dalam kebijakan tersebut ditetapkan mengikuti perubahan harga (inflasi).



Terima Kasih

Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

